

Makalah

UPAYA PENANGGULANGAN PERMASALAHAN  
PENDIDIKAN DASAR DAN PERANAN LEMBAGA  
PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN

PERPUSTAKAAN IKIP PADANG  
TELAH TERDAFTAR

JUDUL : \_\_\_\_\_  
PENGARANG : \_\_\_\_\_  
JENIS : \_\_\_\_\_  
NOMOR : \_\_\_\_\_  
TANGGAL : 03 DEC 1997



KEPALA,

Dra. Gusmar Bahar  
NIP. 130.353.194

Oleh:  
Drs. Hadiyanto, M.Ed.

MILIK PERPUSTAKAAN IKIP PADANG	
DITERIMA TGL. :	09 MAR 1998
SUMBER / HARGA :	K /
KOLEKSI :	K
NO. INVENTARIS :	21/16/98 - 01 (a)
KLASIFIKASI :	372.141.2 Had u

JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
IKIP PADANG  
1997

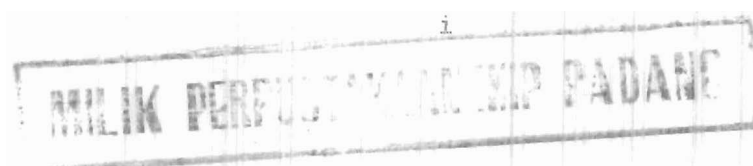
## PENGANTAR

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang sangat strategis untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi dan merupakan tingkat pendidikan yang sangat penting bagi suatu bangsa untuk meningkatkan kualitas pendidikannya. Karena perannya itulah, kritik tentang kualitas pendidikan dasar/atau sekolah dasar sering dilontarkan.

Makalah ini mengupas permasalahan-permasalahan yang muncul yang berkaitan dengan pendidikan dasar dan pendidikan pada umumnya. Di samping itu, makalah ini juga menyajikan jawaban atau upaya yang telah dan yang dapat dilakukan untuk menepis permasalahan itu beserta upaya pengelolaan yang dilakukan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Pendidikan untuk mempersiapkan lulusannya agar dapat berkibrah di lapangan kerja.

Penulisan makalah ini masih mempunyai beberapa kelemahan. Oleh karena itu, kritik dan saran perbaikan tetap penulis harapkan. Bagaimanapun juga, semoga makalah ini dapat memperkaya khasanah pengetahuan dalam pengelolaan pendidikan.

Penulis



## DAFTAR ISI

Pengantar	i
Daftar isi	ii
Bab I Pendahuluan	1
Bab II Permasalahan	3
A. Masalah Peserta Didik	3
B. Masalah Guru	4
C. Masalah Lembaga Penghasil Guru (LPTK)	6
Bab III Pembahasan	8
A. Perubahan Peraturan Perundangan	8
B. Pembinaan Pengelolaan LPTK	13
Bab IV Kesimpulan dan Saran	33
A. Kesimpulan	33
B. Saran-saran	35
Daftar Kepustakaan	37

MILIK PERPUSTAKAAN IKIP PADANG

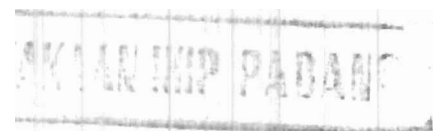
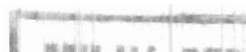
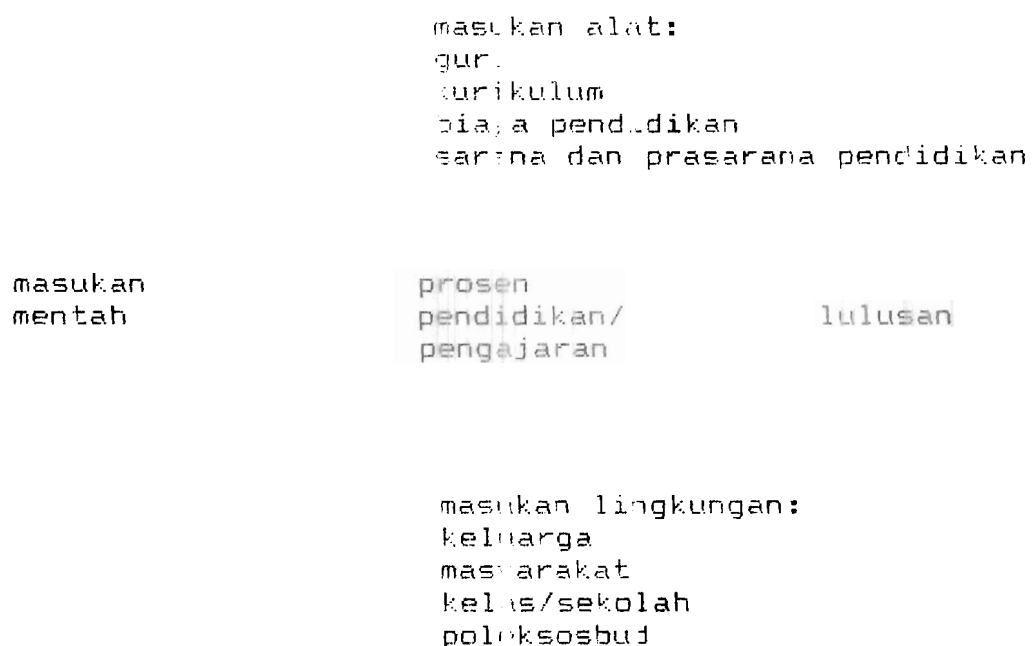
## BAB I

### PENDAHULUAN

Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang sangat strategis untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi dan tingkat pendidikan yang sangat penting bagi suatu bangsa untuk meningkatkan kualitas pendidikannya. Karena peranannya yang demikian penting itulah, kritik tentang kualitas pendidikan dan/atau sekolah dasar sering dilontarkan. Di antara kritik itu mengemukakan bahwa mutu sekolah dasar sekarang ini sangat memprihatinkan (Kompas, 26 Desember 1990). Kritik itu memang cukup beralasan, sebab masih dijumpai beberapa kelemahan, baik kelemahan-kelemahan pada peserta didikanya ataupun kelemahan-kelemahan yang dialami guru pada jenjang pendidikan dasar itu sendiri.

Untuk mengkaji peningkatan kualitas pendidikan dasar, perhatian seharusnya ditujukan kepada semua unsur atau aspek-aspek yang secara simultan mempengaruhi proses belajar mengajar. Mengkambing-hitamkan guru atau peserta didik semata dalam mengkaji menurunnya kualitas pendidikan adalah suatu analisis yang kurang bijaksana. Sebagaimana telah diketahui bahwa proses belajar mengajar

di kelas atau di sekolah dipengaruhi oleh banyak faktor: yaitu masukan mentahnya (peserta didik), masukan alat seperti guru, kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan, biaya dan masukan lingkungan seperti lingkungan kelas atau sekolah, lingkungan keluarga dan lingkungan sosial di mana anak belajar atau mengenyam pendidikan. Diagram berikut memperlihatkan keterkaitan antara berbagai faktor yang ikut mempengaruhi kualitas pendidikan dan atau pengajaran.



## BAB II

### PERMASALAHAN

Permasalahan pendidikan dasar sebenarnya memang cukup kompleks, diantaranya adalah permasalahan yang berhubungan dengan peserta didik, guru dan lembaga penghasil guru atau tenaga kependidikan.

#### A. MASALAH PESERTA DIDIK

Masalah peserta didik berkaitan dengan putus sekolah, kegagalan studi dan mengulang kelas. Sebagai contoh, Vembriarto (1970, 419-420) menunjuk terapan permasalahan yang dihadapi sekolah dasar di Indonesia dewasa ini. Di antara permasalahan itu adalah: pertama, angka anak putus sekolah dasar masih cukup tinggi. Secara kumulatif angka putus sekolah dasar itu dari kelas satu sampai dengan kelas tiga adalah 10%. Kedua, angka kegagalan studi cukup tinggi, yaitu 42% pada tahun 1975/1980; 36% pada tahun 1980/1981; 37% pada tahun 1981/1982; dan 35% pada tahun 1982/1983. Ketiga, jumlah peserta didik yang mengulang kelas masih cukup besar. Pernyataan Vembriarto memang berlawanan, sebab statistik tahun 1991 menunjukkan bahwa pada tahun ajaran 1988/1989 ada

2.559.068 peserta didik, 1989/1990 sebanyak 2.602.349 peserta didik dan 1990/1991 sebanyak 2.537.879 peserta didik yang mengulang kelas (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI 1991, p. 37). Masalah keempat adalah rendahnya persentase peserta didik (37 - 42%) yang melanjutkan studinya ke sekolah lanjutan tingkat pertama. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah karena mereka masih menganggap bahwa lulus dari pendidikan di sekolah dasar pun dianggap cukup, mereka tidak mempunyai biaya untuk melanjutkan pendidikan, mereka merasa tidak mempunyai kemampuan akademik yang memadai untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah pertama, dan kadang-kadang tidak ada sekolah lanjutan di daerah mereka bertempat tinggal (Vembrianto, 1990, p. 420).

#### B. MASALAH GURU

Di samping kritik tentang kualitas peserta didik, guru pun tidak ketinggalan menjadi kambing hitam rendahnya kualitas pendidikan itu (Kompas, 26 Desember 1990; 2 Mei 1991). Hal ini cukup beralasan karena peranan guru untuk pembentukan kualitas peserta didik pada jenjang pendidikan dasar lebih dominan

dibandingkan dengan peranan mereka di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Meskipun masih terjadi silang pendapat tentang siapa yang paling bertanggung jawab terhadap rendahnya mutu pendidikan dasar tersebut, di antara para guru pendidikan dasar, sebagai contoh guru bidang studi Matematika, ada yang menyadari bahwa hal itu adalah karena kelemahan mereka (Kompas, 26 Desember 1990). Lebih jauh Vembrianto (1990, p. 420) mengemukakan bahwa sekitar 10% guru sekolah dasar kemampuannya masih berada di bawah standar minimal yang seharusnya dimiliki guru sekolah dasar (under qualification). Di antara kelemahan-kelemahan guru pendidikan dasar itu adalah seperti yang dikatakan oleh Ansyar (1992, p. 25), bahwa dalam mengajar di kelas guru-guru pendidikan dasar itu hanya sekedar memberikan informasi (information giver) saja. Dengan kata lain, mereka belum mampu menampilkan dan mengembangkan kemampuan mengajar yang optimal untuk meningkatkan efektivitas belajar mengajar di kelas.

Namun demikian, kelemahan-kelemahan guru seperti yang disebutkan di atas itu hendaknya jangan ditimpakan kepada para guru pada jenjang pendidikan dasar semata-mata tanpa memperhatikan sejauh mana



pembinaan yang mereka dapatkan. Di antara mereka ada yang merasa dianak-tirikan dalam pembinaannya (Tempo, 2 Mei 1989). Dengan kata lain mereka merasa bahwa pemerintah masih lebih mementingkan pembinaan guru pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, seperti pada jenjang pendidikan menengah atas ataupun di perguruan tinggi. Lemahnya pembinaan ini nampaknya membawa akibat yang tidak diinginkan, seperti di antara guru ada yang mengusulkan kenaikan pangkatnya dengan rekayasa. Mereka melibatkan oknum tertentu di lembaga pemerintah yang dapat 'menyulap' kenaikan pangkat mereka. Padahal sebenarnya guru tersebut belum memenuhi kriteria naik pangkat menurut peraturan yang ada (Media, 2 Desember 1992). Kasus yang demikian ini mungkin tidak akan terjadi kalau para guru pada pendidikan dasar mempunyai kualitas yang baik dan mendapat bimbingan secukupnya terutama untuk kenaikan pangkatnya dari pimpinan mereka dan lembaga yang berwenang.

### 3. MASALAH LEMBAGA PENGHASIL GURU (LPTK)

Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) juga menjadi sasaran yang biasa disalahkan karena

dianggap tidak atau kurang profesional dalam menghasilkan guru. Berbagai tudingan pun berrnunculan karena LPTK hanya memfokuskan pengetahuan mahasiswa pada aspek kependidikan dan kurang mempedulikan ilmu murninya. Dengan demikian, lulusan LPTK dapat dianggap mampu mengajar, akan tetapi materi yang diajarkan terlalu rendah, atau bahkan tidak menguasai materi itu sendiri.

Memperhatikan berbagai permasalahan di atas, maka yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menepis tudingan-tudingan dan permasalahan di atas, serta bagaimanakah sebenarnya pengelolaan pendidikan di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan itu dilakukan? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat ditemukan pada bab pembahasan.

### BAB III

### PEMBAHASAN

Menyadari pentingnya peranan pendidikan dasar dan adanya beberapa tantangan baik kualitas lulusan maupun gurunya terungkap di atas, pemerintah Indonesia sebenarnya telah melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar itu. Di antara usaha yang ditempuh pemerintah untuk meningkatkan kualitas itu secara berturut-turut ialah melakukan perubahan konstitusional atau peraturan perundang-undangan dan pembenahan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan.

#### A. PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANEAN

Beberapa hal yang dilakukan pemerintah dalam perubahan peraturan perundangan ini adalah dengan menetapkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/Menpan/1989 tentang penetapan Angka Kredit Point untuk kenaikan pangkat guru dan Peraturan Pemerintah Nomor 51

Tahun 1992 tentang kenaikan gaji pegawai negeri sipil .

#### 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional memperkenalkan dan mengatur 'pendidikan dasar', yaitu satu sistem penyelenggaraan pendidikan enam tahun di sekolah dasar dan tiga tahun di sekolah menengah pertama. Sistem pendidikan ini menuntut cara penyelenggaraan yang lebih terpadu dibandingkan dengan system penyelenggaraan pendidikan sebelumnya di mana pada sistem pendidikan yang lama kedua lembaga pendidikan itu pengelolaannya secara terpisah. Dengan demikian system ini diharapkan mampu meningkatkan kemudahan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah pertama. Lebih jauh pemerintah Indonesia telah mencanangkan wajib belajar sembilan tahun, yang secara tidak langsung menacu kemampuan peserta didik sekolah dasar untuk menggapai pendidikan di sekolah menengah tingkat pertama.

#### 2. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990

Untuk menjabarkan pelaksanaan Undang-undang NO. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

terutama pasal 13 tentang pendidikan dasar, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 tentang pendidikan dasar yang mengatur secara mendetail penyelenggaraan pendidikan jenjang itu. Dengan lahirnya peraturan pemerintah ini, para penyelenggara pendidikan mempunyai pedoman yang jelas untuk menyelenggarakan pendidikan di sekolah. Lahirnya kedua peraturan ini merupakan sejarah baru dan sangat berarti untuk pendidikan dasar di Indonesia sebagai langkah yang pasti untuk menata dan meningkatkan kualitas pendidikan dasar berdasarkan peraturan yang lebih jelas.

### 3. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990

Untuk menjabarkan pelaksanaan Undang-undang NO. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan sebagai penyempurnaan dari Undang-undang No. 22 Tahun 1966 tentang Perguruan Tinggi, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1990 tentang pendidikan tinggi yang mengatur secara mendetail penyelenggaraan pendidikan tinggi. Dengan lahirnya peraturan pemerintah ini, para penyelenggara pendidikan tinggi mempunyai pedoman yang

jelas untuk menyelenggarakan pendidikan di perguruan tinggi.

#### 4. Keputusan Menpan Nomor 26/MENPAN/1989

Dalam rangka meningkatkan kreativitas dan kemampuan guru pada jenjang pendidikan dasar, Pemerintah juga memacu karir mereka dengan menerbitkan Keputusan Menteri Penerangan Nomor 26/Menpan/1989 yang mengatur tentang kredit point bagi guru untuk kenaikan pangkat mereka. Dalam peraturan pemerintah itu guru yang akan naik pangkat harus terlebih dahulu memenuhi syarat kredit poin yang diwajibkan, mencakup empat kelompok kegiatan, yaitu: pertama pendidikan, yang meliputi mengikuti pendidikan formal maupun latihan-latihan kedinasan serta memperoleh ijazah, diploma atau surat tanda tamat belajar; Kedua, proses belajar mengajar atau bimbingan dan penyuluhan yang meliputi: melaksanakan proses belajar mengajar atau memberikan bimbingan dan penyuluhan, melaksanakan tugas di daerah terpencil dan melaksanakan tugas khusus di sekolah; Ketiga, pengembangan profesi yang meliputi membuat karya ilmiah di bidang pendidikan, menemukan teknologi tepat guna di bidang pendidikan,

membuat alat pelajaran atau peraga, menciptakan karya seni dan berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum: Keempat, kegiatan penunjang proses belajar mengajar yang meliputi melaksanakan pengabdian pada masyarakat, partisipasi dalam berbagai jenis kegiatan yang mendukung pendidikan (Menteri Negara Pendidikan dan Aparatur Negara 1989, pp. 1-26).

Kegiatan kelompok pertama, kedua dan ketiga disebut juga dengan kegiatan utama. Sedangkan kelompok kegiatan keempat disebut dengan kelompok penunjang. Guru-guru sekolah dasar yang telah mampu mengumpulkan kredit point seperti yang diharuskan, minimal 70% untuk kegiatan kelompok utama dan maksimal 30% untuk kelompok penunjang, diperbolehkan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dalam jangka waktu dua tahun setelah tercapai yang diijinkan (Menteri Negara Pendidikan dan Aparatur Negara, 1989).

Meskipun peraturan pemerintah ini dianggap kurang realistis (Tilaar 1992, p. 46), bagaimanapun juga peraturan ini memacu para guru untuk lebih banyak mempunyai aktivitas yang pada gilirannya akan meningkatkan kemampuan mereka dalam mengajar. Dibandingkan dengan peraturan kenaikan pangkat

sebelumnya, di mana kenaikan pangkat guru hanya tergantung pada datangnya waktu (empat tahun), peraturan kenaikan pangkat baru ini jelas lebih menantang untuk perbaikan kualitas guru.

#### Kenaikan Gaji Pegawai Negeri

Sebagai konsekuensi logis tugas guru yang lebih berat ini, pemerintah Indonesia memperhatikan kesejahteraan mereka dengan menaikkan gaji pegawai negeri sipil. Meskipun kenaikan gaji ini senantiasa diikuti oleh kenaikan harga-harga barang kebutuhan pokok sehari-hari, upaya pemerintah ini harus dianggap sebagai suatu usaha yang sangat positif untuk peningkatan kesejahteraan guru, yang pada akhirnya diharapkan dapat berpengaruh positif dalam bidang pendidikan.

#### B. PEMBENAHAN PENGELOLAAN LPTK

Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) merupakan lembaga yang mendapat tanggung jawab untuk mencetak guru pada pendidikan dasar dan menengah. Oleh karena itu, dalam menjawab permasalahan di atas, pembahasan tentang manajemen di LPTK perlu



diperhatikan.

Pengelolaan pendidikan merupakan suatu proses kegiatan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan sehingga untuk mendapatkan lulusan yang berkualitas, pengelolaan pendidikan harus mendapat perhatian yang proporsional (Peterson, et al., 1991). Melihat pentingnya pengelolaan pendidikan itulah maka, sebagai contoh, dapat dipahami bahwa Pole Ilmiah Pokok IKIP Padang adalah manajemen dan kepemimpinan pendidikan (Mendikbud, 1992). Di samping itu, salah satu tema pokok pembangunan pendidikan yang ditetapkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pun efisiensi pengelolaan pendidikan (Djojonegoro, 1994).

Meskipun pada semua lembaga kerja terdapat sistem pengelolaan, sistem pengelolaan itu mempunyai ciri-ciri sesuai dengan subatansi yang dikelolanya. Sistem pengelolaan pendidikan di perguruan tinggi akan sangat berbeda dengan sistem pengelolaan di Kantor Wilayah Depdikbud, sekolah, lembaga pemerintah non kependidikan atau di lembaga-lembaga bisnis. Perbedaan-perbedaan itu dapat dilihat dari raw input yang dikelola, program kerja yang ditetapkan, personalia yang dipersyaratkan menduduki jabatan serta

organisasi maupun sarana dan prasarana pendukung kegiatan lembaga tersebut. Oleh karena itu, manajemen di perguruan tinggi misalnya, membutuhkan penanganan yang berbeda dengan lembaga-lembaga kerja di atas. Lebih khusus lagi, manajemen di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) juga berbeda dengan lembaga pendidikan non LPTK.

Di antara beberapa hal yang membedakan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dengan perguruan tinggi lain non LPTK adalah isi atau pembekalan yang diberikan kepada mahasiswa. Mahasiswa LPTK adalah calon-calon tenaga kependidikan yang akan berhadapan langsung dengan murid-murid di sekolah atau tenaga pengelola pendidikan pada lembaga kerja kependidikan. Tugas LPTK adalah mempersiapkan mereka agar saat bekerja, mereka tidak mengecewakan lembaga yang mempekerjakannya. Oleh karena itu, pembekalan yang dilakukan di LPTK meliputi aspek moral, keteladanan, kebudayaan dan integritas ilmu dengan keoribadiannya. Di samping mereka mempelajari matakuliah yang tergabung dalam Matakuliah Dasar Umum (MKDU) dan Matakuliah Bidang Studi (MKBS) sebagai bekal untuk kehidupan bernegara dan kemampuan keahliannya, mereka

belajar Matakuliah Dasar Kependidikan (MKDK) dan Matakuliah Proses Belajar Mengajar (MKPBM).

Pembekalan matakuliah MKDK dan MKPBM itu adalah agar mahasiswa LPTK menguasai dan menghayati ilmu-ilmu kependidikan dan mampu menyampaikan materi ajar di kelas dengan optimal. Dengan kata lain, lulusan LPTK tidak saja dituntut untuk dapat mengajar, akan tetapi juga mendidik murid-murid mereka kelak.

Untuk mengetahui bagaimana sebaiknya manajemen pendidikan di LPTK, yang mempunyai ciri-ciri seperti tersebut di atas dilakukan, makalah ini menguraikan beberapa hal yang tergabung dalam sub-topik pengelolaan kegiatan akademik, personalia dan kepemimpinan di LPTK.

### **1. Pengelolaan Kegiatan Akademik**

Proses pendidikan agar mahasiswa menjadi lulusan yang berkualitas tidak dapat disamakan dengan proses memproduksi barang-barang perusahaan di antaranya karena mahasiswa mempunyai karakteristik sebagai human. Dengan demikian efektivitas dan efisiensi peningkatan kualitas pendidikan tidak dapat dianalogkan dengan

penghitungan matematis, apalagi dengan penghitungan untung-rugi. Oleh karena itu tidak salah kalau orang mengatakan bahwa pendidikan itu mahal, karena pendidikan adalah 'human investment' yang hasilnya tidak dapat dipetik seketika, segera setelah mahasiswa menamatkan studinya.

Sebagai subjek didik, mahasiswa adalah mera dari segala kegiatan atau proses yang dilakukan di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Peningkatan kualitas staf pengajar, perbaikan kurikulum dan pengajaran, penambahan fasilitas belajar seperti perpustakaan, laboratorium dan ruang kuliah adalah dalam rangka memberi pelayanan 'yang terbaik' untuk memaksimalkan belajar mahasiswa.

#### a. Pendidikan dan Pengajaran

Pendidikan dan pengajaran, sebagai dhurma pertama dari Tridharma Perguruan Tinggi merupakan tugas utama Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Karena sebagian besar kegiatan ini berlangsung di kelas, maka kelengkapan pengajaran untuk mengoptimalkan

proses belajar mengajar seperti alat, media, sumber belajar dan silabus perlu diperhatikan. Di samping itu, dosen harus memahami dan menerapkan prinsip aktualitas dan fleksibilitas kurikulum untuk mengakomodasi tuntutan globalisasi dan kebutuhan masyarakat (link and match) yang senantiasa berubah dan berkembang.

Peran pendidikan dan pengajaran ini sebenarnya peran yang sangat penting bagi LPTK untuk membuktikan keberhasilan atau kegagalannya berpartisipasi dalam peningkatan sumber daya manusia untuk pembangunan. Dari kegiatan pendidikan dan pengajaran inilah masyarakat akan menikmati dan mengetahui kualitas lulusan LPTK.

Di samping mendidik mahasiswa di kelas, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) juga memberi bekal kepada mahasiswa di luar kelas, baik merupakan kegiatan yang terprogram maupun yang bersifat insidental (hidden curriculum). Hal ini dimaksudkan agar mereka dapat mengembangkan kemampuan seoptimal mungkin seperti lewat kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler. Dengan demikian, kegiatan ini perlu diperhatikan

dan dikelola seoptimal mungkin sehingga segala fasilitas yang dimiliki lembaga pendidikan dapat berfungsi untuk mendidik mahasiswa.

Di luar keinginan tersebut di atas, ada keterbatasan yang harus dipahami oleh pengelola LPTK bahwa tidak semua masukan/calon mahasiswa LPTK mempunyai potensi terbaik. Secara umum masukan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (IKIP) negeri adalah lebih rendah dibandingkan dengan masukan universitas (Ansyar, 1995). Sementara itu telah pula dipahami bahwa masukan (raw input) dari lembaga pendidikan merupakan salah satu komponen yang amat penting dalam proses pendidikan di samping faktor-faktor lain seperti guru, sarana dan prasarana pendidikan, kurikulum, biaya dan lingkungan pendidikan. Dengan demikian tuduhan yang mengatakan bahwa kualitas lulusan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) lebih rendah dibandingkan dengan kualitas lulusan universitas harus dipahami dari konteks di atas.

## b. Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat

Di samping tugas pendidikan dan pengajaran, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) juga mengemban tugas penelitian sebagai dharna kedua dari Tridharma Perguruan Tinggi. Kegiatan penelitian dapat mempunyai manfaat ganda (multi purposes) di samping untuk pengembangan ilmu juga dapat meningkatkan kemampuan staf pengajar dalam bidang studi yang dibinanya maupun dari segi kemampuan melaksanakan penelitian itu sendiri. Dengan demikian fungsi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) tidak semata-mata memenuhi kebutuhan masyarakat akan calon tenaga kerja (link and match) akan tetapi juga mempunyai misi pengembangan ilmu kependidikan lewat penelitian. Untuk meraih keinginan di atas, pembinaan kualitas peneliti dari pemula ke peneliti mandiri dan produktif perlu menjadi perhatian yang terus menerus.

Untuk membatani perkembangan ilmu dan teknologi kependidikan dengan kebutuhan masyarakat, Lembaga Pendidikan Tenaga



Kependidikan (LPTK) juga perlu mempertajam dharma ketiganya, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Dharma ini dapat dilakukan baik oleh mahasiswa, karyawan maupun staf pengajar di LPTK. Keuntungan yang dapat diperoleh LPTK di balik niat tulus mengabdikan kepada masyarakat adalah LPTK dapat memperoleh feedback dan atau dukungan positif serta dapat dekat dan diterima masyarakat. Pengkajian kebutuhan masyarakat tentang hal-hal yang dapat dibantu oleh LPTK serta perencanaan kegiatannya secara matang dan komprehensif merupakan upaya yang harus tetap dilakukan. Untuk memenuhi maksud itu, kerjasama antara kegiatan pengabdian masyarakat dengan kegiatan penelitian perlu ditingkatkan untuk membentuk 'linkage' yang dimungkinkan lebih menguntungkan masyarakat pemakai.

Di antara beberapa contoh kegiatan yang dapat dilakukan LPTK adalah:

#### *1) Pengembangan Desa Bina LPTK*

Desa bina adalah lokasi LPTK melaksanakan pengabdian atau melakukan kegiatan-kegiatan



secara terus menerus mengenai hal-hal yang dibutuhkan masyarakat. Untuk memberikan layanan kegiatan-kegiatan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat tersebut fungsi penelitian pendahuluan dan perencanaan kegiatan secara matang sangat diperlukan.

Untuk memperoleh dukungan yang positif dari semua pihak, pengembangan desa bina LPTK harus dilakukan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah setempat. Program ini diharapkan akan sejalan dengan program pemerintah dalam rangka pengentasan desa tertinggal.

## 2) Pendekatan Pimpinan LPTK ke Masyarakat

Kunjungan ke sekolah-sekolah atau lembaga kerja yang biasanya menjadi tempat Praktek Lapangan atau magang mahasiswa oleh unsur pimpinan LPTK merupakan upaya dalam meningkatkan kerjasama dengan masyarakat. Apabila hal ini dilakukan, dukungan lembaga-lembaga tersebut kepada LPTK dalam bentuk bimbingan yang sungguh-sungguh kepada mahasiswa FL atau magang akan didapatkan. Hal ini untuk merealisasi bahwa

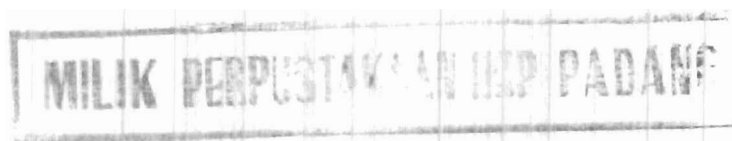
pimpinan adalah bukan orang yang hanya bergemul di belakang meja (Dikti, 1993).

Pengalaman penulis pada beberapa kali melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat (lebih khusus mereka yang ada di sekolah-sekolah) menginginkan lebih dekat dengan IIRIP. Hal demikian berarti bahwa kerjasama yang dibina selama ini harus ditingkatkan untuk saling memperoleh keuntungan.

### 3) Pusat Informasi Kependidikan

Sebagai lembaga yang bergerak di bidang kependidikan, sudah waktunya Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) menjadi pusat informasi kependidikan atau paling tidak menjadi bank data kependidikan di daerah di mana LPTK berada. Di samping pusat informasi itu bermanfaat untuk kegiatan pengembangan ilmu dan penelitian oleh dosen-dosen LPTK yang bersangkutan, lembaga ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang mempunyai keinginan dalam pengembangan pendidikan.

Usaha mewujudkan Pusat Informasi



Kependidikan ini memang bukan suatu hal yang mudah dilakukan. Di samping membutuhkan fasilitas dan teknologi informasi yang mahal. Pusat Informasi Kependidikan juga memerlukan tenaga terampil yang handal untuk mengoperasikan alat-alat modern dalam rangka 'meng-up-date' informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan.

## 2. Pengelolaan Personalia di LPTK

Personalia di LPTK dapat dibedakan menjadi tenaga edukatif dan non edukatif. Tenaga edukatif (dosen) yang biasanya merupakan mayoritas tenaga di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) merupakan unsur utama untuk mendukung berlangsungnya proses belajar mengajar. Keberadaan dosen ini merupakan ciri perbedaan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dengan lembaga kerja non kependidikan lainnya.

Untuk menjaga agar lulusan LPTK tetap berkualitas, mutu dosen perlu senantiasa diperhatikan oleh pimpinan. Hal ini beresasan karena wawasan, ilmu dan materi ajar yang dimiliki dosen untuk belal mendidik mahasiswa harus senantiasa 'up to date' agar

mengikuti kemajuan ilmu dan teknologi. Dengan demikian pimpinan LPTK harus berusaha agar para dosen senantiasa 'meng-up-date' wawasan dan ilmu yang dimiliki dosen. Hal itu dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti seminar, penataran, studi lanjutan S2 atau S3 baik di dalam maupun di luar negeri. Di samping itu mereka juga dapat mengikuti program Akta Mengajar V.

Tanggung jawab peningkatan kualitas dosen sebenarnya bukan merupakan monopoli pimpinan semata. Dosen yang bersangkutan dapat memanfaatkan suasana ilmiah kampus untuk mengembangkan kemampuannya. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan kebebasan ilmiah maupun kebebasan mimbar di perguruan tinggi. Hal ini dimaksudkan agar para dosen LPTK memiliki kekuasaan ilmiah dan mampu menggunakan kebebasan mimbar akademik dengan dasar keahlian atau keprofesionalannya. Kecenderungan yang menurut penulis masih ada di permukaan sekarang adalah bahwa kekuatan ilmiah masih diwarnai oleh jabatan dan senioritas serta kebebasan mimbar belum dimanfaatkan dengan optimal. Sebagai contoh, belum banyak journal atau majalah-majalah

ilmiah (khususnya yang berkait dengan bidang studi) yang diterbitkan secara nasional oleh LPTK. Kalau saja kesempatan kebebasan ilmiah ini dapat dimanfaatkan secara optimal, di samping para staf pengajar LPTK dapat mengembangkan karir mereka, perkembangan ilmu dan teknologi kependidikan pun akan laju semakin pesat.

Dukungan yang berupa insentif kepada para staf pengajar untuk mampu menulis buku-buku ilmiah, di luar keinginan staf pengajar untuk memenuhi kredit point dalam rangka kenaikan pangkat mereka, masih sangat perlu diperhatikan dan ditingkatkan.

Untuk mendukung ide ini di atas, peranan perpustakaan atau pusat sumber belajar menjadi amat sentral. Bagaimana demikian, apakah sekarang ini perpustakaan di LPTK telah mendukung wacana di atas? Dan andaihan perpustakaan sudah memadai, apakah para dosen sudah memanfaatkan fasilitas itu dengan optimal?

Di samping melakukan pembinaan kemampuan dosen, LPTK pun perlu memperhatikan kualitas dan pendidikan tenaga penunjang akademik. Pembinaan dengan *in-service, on the job training* adalah upaya yang harus

tetap dilakukan. Di samping itu pimpinan perlu memberi dukungan dan penghargaan kepada tenaga penunjang akademik yang ingin menempuh pendidikan formal sebagai lanjutan dari pendidikan yang telah mereka tempuh sebelumnya. Hal ini dimungkinkan agar mereka benar-benar mempunyai kemampuan profesional di bidangnya untuk kemudian mengembangkan fungsionalisasi keahliannya secara penuh. Dengan demikian kebijaksanaan akademik diharapkan seimbang dengan keahlian profesional mereka. Demikian juga sebaliknya, untuk kerja mereka dapat mengimbangi kemajuan ilmu dan teknologi kependidikan di LPTK yang bersangkutan.

### 3. Kepemimpinan di LPTK

Dosen di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) merupakan kumpulan dari para sarjana, master, magister ataupun doktor yang mempunyai keahlian sesuai dengan ilmunya. Mereka sangat beragam dan bisa jadi, mereka lebih senior daripada pimpinannya. Ciri-ciri di atas adalah ciri lembaga ilmiah yang mungkin hanya ada di perguruan tinggi. Dengan melihat ciri-ciri di atas, LPTK perlu mempunyai ciri-ciri kepemimpinan yang

berbeda dengan lembaga kerja lain. Menurut herat penulis, kepemimpinan yang cocok dikembangkan di LPTK adalah kepemimpinan yang partisipatif, demokratis dan kesejawatan.

Kepemimpinan partisipatif artinya melibatkan banyak unsur untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan. Dalam rangka pembinaan dan kaderisasi, kondisi ini menguntungkan karena memacu bawahan terlibat dalam berbagai kegiatan yang pada akhirnya akan meningkatkan karir mereka. Di samping itu, pimpinan juga membuka kesempatan kepada bawahan untuk memberi masukan-masukan yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Ini berarti bahwa pimpinan mempunyai banyak alternatif sehingga kelemahan dalam pengambilan keputusan dapat diminimalkan.

Kepemimpinan demokratis juga merupakan kepemimpinan yang tepat dilakukan di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan. Tipe kepemimpinan ini melibatkan semua unsur bawahannya dalam proses pengambilan keputusan, dan keputusan diambil dengan cara mencari kesepakatan dari anak buah. Dengan demikian, keputusan itu senantiasa mendapat dukungan

dan tidak mendapat reaksi negatif karena telah disepakati semua pihak. Di samping itu, kepemimpinan ini memacu anak buah untuk 'mengamankan' keputusan karena mereka merasa ikut dilibatkan dan memiliki keputusan yang dimaklud. Kepemimpinan demokratis juga merupakan suatu media untuk mendidik anak buah atau anak didik untuk mengembangkan kemampuan menghargai serta menerima pendapat orang lain. Sifat-sifat demokratis dalam kepemimpinan pendidikan ini dapat ditiru dan dilestarikan oleh anak didik melalui keteladanan yang dibagikan oleh guru.

Kepemimpinan kesejawatan juga merupakan ciri kepemimpinan yang ada dan perlu dikembangkan di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Kesejawatan inilah yang kemudian dapat dengan cepat menumbuhkan sikap menghargai anak buah karena pimpinan menganggap bahwa mereka adalah kawan yang dapat diajak dialog untuk memecahkan masalah yang dihadapi lembaga. Di samping itu, pimpinan juga tetap menghargai bahwa meskipun untuk sementara waktu mereka sebagai anak buah, mereka adalah teman seprofesi yang mungkin malah lebih tua usianya dan telah berbuat lebih banyak dibandingkan dengan pimpinan. Meskipun batas antara



pimpinan dan bawahan dalam kepemimpinan kesejawatan ini kadang-kadang kabur. Bawahan tetap 'respect' karena sikap kesejawatan yang ditunjukkan pimpinan itu.

Dengan 'warna' kepemimpinan di atas, suasana di LPTK menjadi sangat kondusif. Di samping pimpinan menerapkan sistem komunikasi dari atas ke bawah (top-down), sistem 'bottom-up' pun dapat dengan lancar dilakukan (Dikti, 1993). Hal ini berarti bahwa ide, keinginan, permasalahan dan apa yang dirasakan anak buah dan menyangkut kepentingan bersama akan sampai kepada pimpinan untuk di-'shared' bersama.

Erat kaitannya dengan kepemimpinan adalah mekanisme kerja di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan. Mekanisme kerja ini juga merupakan unsur penting untuk menunjang kelancaran kegiatan atau program di LPTK. Mekanisme kerja yang biasanya didasarkan atas aturan-aturan atau kebijaksanaan harus dipahami oleh semua unsur civitas akademika di LPTK sehingga mereka tahu tugas dan fungsinya masing-masing. Mereka juga mengetahui bagaimana prosedur penyelesaian masalah manakala ada kasus-kasus yang harus mereka tangani. Dengan demikian urusan-urusan

yang kecil yang dapat diselesaikan di tingkat tertentu, tidak mengalir dan bertumpu ke atas menjadi 'pekerjaan sambilan' pimpinan tertinggi LPTK.

#### 4. Konversi IKIP ke Universitas

Perbaikan kualitas pendidikan dasar nampaknya tidak berhenti pada bidang-bidang yang secara langsung terlibat dalam proses belajar mengajar pada pendidikan dasar. Pada tahun 1996 ini perhatian pemerintah juga ditujukan kepada peningkatan kualitas lembaga pencetak guru (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan). Mulai Pelita VI, sepuluh Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Negeri secara berangsur-angsur akan dikonversi menjadi universitas. Usaha ini merupakan usaha besar yang perlu ditangani secara sungguh-sungguh dan profesional. Apabila kualitas lembaga pencetak guru ini menjadi lebih baik, maka keluarannya, yang nantinya akan mengajar pada pendidikan dasar, juga diharapkan menjadi lebih baik.

Suatu hal yang perlu menjadi perhatian nantinya adalah karena mahasiswa yang akan menjadi guru itu telah mendapat ilmu murni yang diambil dari fakultas-fakultas non keguruan, maka tugas fakultas keguruan

(FIP/FKIP) menjadi lebih berat. Dengan demikian, fakultas ini diharapkan mampu menggantikan peran IKIP LPTK yang pernah dipertankan sebelumnya.

MILIK PERPUSTAKAAN IMP PADANG

## BAB III

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan di depan ini antaranya adalah:

1. Untuk menanggulangi kelemahan-kelemahan pendidikan dasar, pemerintah telah melakukan usaha-usaha seperti ditetapkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/Menpan/1989 tentang penetapan Angka Kredit Point untuk kenaikan pangkat guru, kenaikan gaji pegawai negeri sipil dan konversi IKIP ke universitas.
2. Meskipun unsur-unsur/substansi pengelolaan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan tidak jauh berbeda dengan pengelolaan perguruan tinggi non kependidikan lainnya, beberapa spesifikasi kependidikan harus ditonjolkan karena lulusan

LPTK adalah tenaga kependidikan yang mengemban transformasi moral, keteladanan, kebudayaan dan integritas ilmu dengan kepribadiannya.

3. Di samping mendidik mahasiswa untuk menjadi tenaga kependidikan, LPTK juga mengemban misi pengembangan ilmu lewat kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Tugas-tugas ini juga dapat digunakan untuk mendekatkan LPTK pada masyarakat yang kemudian diharapkan akan memberi good will kepada LPTK.
4. Pembinaan dan peningkatan karir baik tenaga edukatif maupun perunjang akademik harus senantiasa diperhatikan. Di antara cara yang dapat dilakukan adalah dengan seminar, penataran atau studi lanjutan.
5. Pimpinan LPTK lebih tepat menerapkan kepemimpinan partisipatif, demokratis dan kesejawatan karena kepemimpinan ini dipandang lebih 'tepat' dengan iklim dan ciri ilmiah lembaga kependidikan. Untuk mendukung kepemimpinan itu, mekanisme kerja di LPTK perlu dipahami oleh semua civitas akademika sehingga tugas masing-masing unsur menjadi lebih jelas

dan tegas.

## B. Saran-saran

Beberapa saran yang dapat diajukan setelah memperhatikan pembahasan di depan di antaranya adalah:

1. Tanggung jawab peningkatan kualitas pendidikan bukan berada pada salah satu unsur pendidikan saja, akan tetapi pada semua unsur yang ikut mempengaruhi proses pendidikan. Oleh karena itu, hendaknya tidak ada salah satu pihak yang hanya menyalahkan satu unsur saja tanpa mempedulikan unsur-unsur yang lain.
2. Meskipun Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan bukan satu-satunya lembaga yang paling bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas pendidikan dasar, pembenahan pengelolaan perlu mendapat perhatian yang lebih serius. Di samping itu, jalinan hubungan dengan masyarakat (kemitraan) hendaknya tidak menjadi teori saja.
3. Karena peran Fakultas Ilmu Pendidikan atau Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan di 'universitas dari IKIP' adalah seperti peran

LPTK pada masa sebelumnya, maka peningkatan kualitas pada semua aspek yang terlibat dalam proses belajar mengajar dan unit-unit pendukungnya perlu dilakukan. Apabila hal ini kurang mendapat perhatian, dikhawatirkan pembentukan 'guru' dari mahasiswa ilmu matematika akan kurang mencapai sasaran yang diharapkan.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ansyar, M. 1995. *Memorandum Akhir Masa Jabatan Rektor IKIP Padang Periode 1991-1995*. Pacang: IKIP Padang
- Ditjen Dikti, 1993. *Rumusan-rumusan Lokakarya Pengelolaan Mutu Total Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdikbud.
- Djojonegoro, W., 1994. 'Kebijaksanaan Operasional Wajib Belajar 9 Tahun' *Prisma*, No. 5, pp. 3-19.
- Kompas, 26 December 1990.
- Kompas, 2 May 1991.
- Mendikbud RI, 1992. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0460/0/1992 tentang Statuta IKIP Padang. Jakarta: Depdikbud.
- Peterson, M.W, et. al., 1991. *Organization and Governance in Higher Education*. Needham Heights: Ginn Press.
- Republik Indonesia, 1989. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 1990. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 1990. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 1991. *Statistik Persekolahan SD 1990/1991*, Pusat Informatika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 1992. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1992 tentang Daftar Penyerbuan Gaji Pokok bagi Pegawai Negeri. Jakarta.



Sutjipto, 1991, 'Manajemen di Sekolah Dasar dan Menengah', disampaikan pada Konggres I Himpunan Sarjana Administrasi Pendidikan di Bukittinggi, September 16-18, 1991.

Vembriarto, St., 1990, 'Kondisi Pendidikan Dasar Menuju Lepas Landas', *Analisis*, Tahun XIX, No. 5, pp. 417-426.